



PENINDAKAN KEIMIGRASIAN: STRATEGI DAN KEBIJAKAN EFEKTIF DALAM MENGATASI MASALAH MIGRASI ILEGAL

Oktavia S. F Harianja¹, Rahmawati Nurul Jannah², Virra Wirdhiningsih³
oktaviaharianja06@gmail.com¹, rahmanj@gmail.com², nathifamr@gmail.com³

Politeknik Pengayoman Indonesia

Abstract

Effective immigration enforcement is essential in addressing the challenges posed by illegal migration. This article delves into successful strategies and policies employed globally to tackle this issue. The focus is on enhancing border surveillance, strengthening law enforcement, and fostering international cooperation. A holistic and coordinated approach involving immigration agencies, law enforcement, and international institutions is crucial in addressing the complexities of illegal migration. Evaluating the sustainability and positive societal and economic impacts of these strategies is integral to their success. This comprehensive overview underscores the significance of collaborative efforts in developing and implementing immigration enforcement measures.

Keywords: *Immigration Enforcement, Effective Policies, Combating Illegal Migration.*

PENDAHULUAN

Migrasi adalah fenomena global yang telah menjadi perhatian utama dalam pembahasan kebijakan publik di berbagai belahan dunia. Peningkatan mobilitas manusia telah memunculkan berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Salah satu isu yang mendominasi dalam diskusi mengenai migrasi adalah masalah migrasi ilegal. Migrasi ilegal, yang seringkali melibatkan perlintasan batas tanpa izin atau dokumen yang sesuai, dapat memiliki dampak ekonomi, sosial, dan keamanan yang signifikan bagi negara-negara penerima maupun para migran itu sendiri. (Rahma et al., 2022) Dalam konteks inilah penindakan keimigrasian menjadi topik krusial yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah-pemerintah di seluruh dunia. Bagaimana sebuah negara menangani masalah migrasi ilegal akan sangat memengaruhi stabilitas sosial, keamanan nasional, dan kualitas hidup para migran yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan kebijakan efektif yang mampu mengatasi masalah migrasi ilegal dengan baik. (Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia (Studi Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan), n.d.)

Migrasi manusia, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal, telah menjadi fenomena global yang memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan keamanan di seluruh dunia. Migrasi ilegal, khususnya, muncul sebagai tantangan serius yang menuntut perhatian dan tindakan khusus dari pemerintah, lembaga internasional, dan komunitas global. Dalam konteks ini, penindakan keimigrasian menjadi fokus utama untuk mengatasi masalah migrasi ilegal. (Triantoro, 2016)

Migrasi ilegal terjadi ketika individu atau kelompok menyeberang batas negara tanpa izin resmi dari pemerintah yang bersangkutan. Hal ini dapat terkait dengan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang sulit, konflik politik, atau upaya pencarian kehidupan yang

lebih baik. Dalam pandangan ini, strategi dan kebijakan keimigrasian menjadi instrumen krusial untuk mengelola, mengurangi risiko, dan memberikan solusi terhadap masalah kompleks ini.

Pentingnya penindakan keimigrasian yang efektif tidak hanya terletak pada perlindungan kepentingan negara dan keamanan nasional, tetapi juga pada aspek-aspek kemanusiaan. Penanganan yang cerdas dan berbasis hak asasi manusia diperlukan untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses migrasi, sekaligus menjaga ketertiban sosial dan keamanan di tingkat global.

Melalui pemahaman mendalam terhadap tantangan migrasi ilegal, naskah ini akan mengeksplorasi strategi dan kebijakan keimigrasian yang efektif. Dengan fokus pada kolaborasi internasional, perlindungan hak asasi manusia, dan pendekatan holistik, diharapkan penindakan keimigrasian dapat memberikan solusi berkelanjutan dalam menanggapi kompleksitas masalah migrasi ilegal di era globalisasi ini.

Peran aktif Indonesia dalam forum-forum internasional dan regional, seperti Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes (Bali Process), merupakan salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam analisis mengenai strategi dan kebijakan penindakan keimigrasian dalam mengatasi masalah migrasi ilegal. Partisipasi Indonesia dalam forum-forum ini mencerminkan komitmen negara ini dalam bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menangani isu-isu migrasi ilegal yang melibatkan penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan kejahatan lintas batas terkait.(Nugroho, 2017)

Bali Process, sebagai salah satu contoh forum tersebut, telah menjadi salah satu wadah utama di Asia Pasifik dalam upaya menanggulangi perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Dalam konteks ini, Indonesia dan Australia memiliki peran sentral sebagai Ketua Bersama, yang menunjukkan kerja sama antarnegara dalam menghadapi masalah tersebut. Keanggotaan Bali Process yang mencakup 45 negara dan 4 organisasi internasional menciptakan platform yang kuat untuk pertukaran informasi, pengembangan strategi bersama, dan pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam penanganan migrasi ilegal. Dalam konteks upaya menanggulangi masalah migrasi ilegal, pentingnya penindakan keimigrasian yang efektif menjadi sorotan utama. Studi kasus terbaru dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menyoroti kompleksitas isu ini, terutama dalam penanganan pelanggaran izin tinggal oleh WNA Tiongkok.(Husni et al., 2023)

Pada tanggal 10 November 2023, Imigrasi Ngurah Rai memberlakukan tindakan pendeportasian terhadap seorang WNA Tiongkok berinisial YZ (Lk, 30). YZ terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dengan bekerja pada sebuah perusahaan di Bali, meskipun seharusnya hanya memiliki izin tinggal kunjungan. Keberhasilan penindakan ini dilakukan melalui patroli keimigrasian yang merupakan respons terhadap informasi dari masyarakat.

Dalam proses pemeriksaan, YZ mengakui bahwa ia telah dua kali masuk ke Indonesia, yang terakhir melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 23 Agustus 2023. Modus operandi YZ melibatkan pekerjaan mencari wisatawan di Tiongkok dan kemudian bekerja di Indonesia, menyewa kendaraan sebagai penyamaran. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Suhendra, menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh YZ melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 75 Ayat (1). Sebagai respons, YZ dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian, dan namanya diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar tangkal.

Kasus ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam penegakan kebijakan keimigrasian. Oleh karena itu, penyelidikan lebih lanjut terkait strategi dan kebijakan keimigrasian yang efektif sangat relevan untuk menanggapi masalah migrasi ilegal secara

holistik dan berkelanjutan. Dengan melihat kasus konkret ini, kita dapat mendalami elemen-elemen kunci yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan strategi keimigrasian yang efektif dan berdaya guna.

Pendahuluan ini bertujuan untuk menyelidiki dan membahas beberapa strategi dan kebijakan yang telah diterapkan oleh beberapa negara dalam upaya mereka untuk mengatasi masalah migrasi ilegal. Kami akan membahas pendekatan yang berbeda, melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta mengevaluasi tingkat keefektifan mereka dalam menangani tantangan migrasi ilegal. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi dan kebijakan yang efektif dalam penindakan keimigrasian, diharapkan kita dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat umum untuk mendukung upaya-upaya yang lebih efisien dalam menghadapi masalah kompleks ini. Dengan demikian, kita dapat membangun dunia yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam fenomena migrasi global.

METODE

Metode analisis literatur menjadi pendekatan yang tak ternilai dalam menghadapi kompleksitas isu strategi dan kebijakan penindakan keimigrasian terkait dengan migrasi ilegal. Pendekatan ini melibatkan eksplorasi, penyelidikan, dan evaluasi berbagai sumber literatur yang terkait dengan tema penelitian, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap evolusi pengetahuan dan perspektif yang telah muncul dalam literatur yang relevan.

Langkah awal dalam menerapkan metode ini adalah melakukan pencarian sistematis melalui basis data akademik dan perpustakaan daring yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Penggunaan kata kunci seperti "penindakan keimigrasian," "strategi penindakan migrasi ilegal," dan "kebijakan migrasi ilegal" menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan dengan fokus analisis.

Pencarian ini juga mencakup sumber-sumber dari organisasi internasional dan regional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN. Keterlibatan sumber-sumber ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas terkait praktik-praktik terbaik, regulasi, dan kerjasama internasional dalam menanggulangi masalah migrasi ilegal.

Setelah identifikasi sumber-sumber yang relevan, tahap berikutnya dalam metode analisis literatur ini adalah pengumpulan dan kategorisasi informasi yang ditemukan. Ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber literatur yang berkualitas tinggi dan pembangunan suatu kerangka konseptual yang menggambarkan perkembangan pemikiran dan temuan utama terkait dengan strategi dan kebijakan penindakan keimigrasian. (Sofyan, 2014)

Dalam proses analisis, penting untuk menyelidiki perspektif yang beragam dan mungkin kontradiktif dalam literatur. Ini memungkinkan peneliti untuk merinci perbedaan pendapat, perdebatan, serta kelemahan dan kelebihan dari setiap pendekatan yang telah diusulkan atau diterapkan dalam konteks penindakan keimigrasian. Melalui metode analisis literatur ini, diharapkan dapat terungkap gambaran komprehensif mengenai strategi dan kebijakan penindakan keimigrasian yang efektif dalam menanggapi masalah migrasi ilegal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun landasan teoritis yang kokoh dan merinci pandangan yang dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih baik dan implementasi strategi yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian, Konteks, dan Tinjauan Terhadap Kondisi Migrasi Ilegal di Indonesia

Migrasi sebagai salah satu faktor perubahan jumlah penduduk memiliki implikasi signifikan dalam konteks Indonesia yang geografis dan demografinya sangat beragam. Migrasi ilegal, sebagai varian dari fenomena ini, menciptakan tantangan tersendiri. Migrasi ilegal dapat didefinisikan sebagai perpindahan penduduk lintas batas yang dilakukan tanpa izin atau melanggar ketentuan hukum imigrasi yang berlaku di suatu negara.

Migrasi ilegal tidak hanya merupakan masalah lokal, tetapi juga fenomena global yang melibatkan banyak negara. Dampaknya dapat dirasakan pada tingkat nasional dan internasional. Secara global, tren migrasi ilegal memberikan tekanan tambahan pada tata kelola imigrasi, menguji ketersediaan sumber daya, dan menciptakan ketidakpastian keamanan di beberapa wilayah konteks global migrasi ilegal menjadi lebih jelas saat melihat data jumlah migran ilegal dan rute yang umum digunakan. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan ekonomi antarnegara, konflik, dan perubahan iklim menjadi pendorong utama migrasi ilegal. Rute migrasi ilegal seringkali melibatkan jalur-jalur yang tidak resmi, menciptakan tantangan tambahan dalam pengelolaan dan penanganan masalah ini. Pertumbuhan jumlah pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri di Indonesia menjadi perhatian serius, memerlukan koordinasi dan tindakan bersama dari pemerintah, organisasi internasional, dan pemerintah daerah. Hingga Agustus 2021, tercatat 13.343 orang pencari suaka dan pengungsi berada di Indonesia, dengan sebagian besar difasilitasi oleh International Organization for Migration (IOM). Rapat Koordinasi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia pada 28 Oktober 2021 menyoroti upaya dan tantangan yang dihadapi. (Yuli Kusmanto, 2014)

Menurut Kepala Sub Direktorat Kerjasama Keimigrasian dengan Organisasi Internasional, Ferry Herling Ishak Sioth, dari jumlah tersebut, 3.223 orang berasal dari 20 negara, termasuk Afganistan, Somalia, Myanmar, dan lainnya. Upaya pemerintah Indonesia melibatkan peningkatan kuota dan percepatan proses penempatan pengungsi ke negara ketiga melalui mandat UNHCR. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membantu pengungsi dengan berbagai cara. Meningkatkan kuota dan percepatan proses penempatan pengungsi ke negara ketiga merupakan langkah strategis. Selain itu, upaya pemulangan sukarela yang difasilitasi oleh IOM, serta deportasi terhadap pengungsi yang ditolak final oleh UNHCR, menjadi bagian dari pendekatan yang holistik.

Rapat di Makassar menegaskan pentingnya kolaborasi antara Ditjen Imigrasi, Pemerintah Kota Makassar, dan Organisasi Internasional. Dengan jumlah pengungsi yang signifikan di kota Makassar, koordinasi dan sinergi di tingkat lokal menjadi kunci. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto, menekankan perlunya peningkatan pengawasan terhadap pengungsi di Kota Makassar untuk meminimalisir potensi kerawanan.

Meskipun terdapat upaya konkret, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Pengelolaan pendeteksian, pemulangan, dan pemindahan pengungsi memerlukan pendekatan yang matang. Pemerintah dan mitra internasional perlu fokus pada peningkatan koordinasi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan solusi jangka panjang seperti peningkatan akses pendidikan dan peluang kerja bagi pengungsi. (Anggaunitakiranantika, 2017)

Analisis situasi terkini migrasi ilegal di Indonesia memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika fenomena ini. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019 memberikan wawasan yang berharga. Provinsi Kepulauan Riau dan DKI Jakarta menjadi pusat perhatian dengan persentase tertinggi penduduk berstatus migran masuk dan keluar seumur hidup. Dari segi demografi, migran risen, terutama laki-laki, didominasi oleh kelompok umur produktif (20-39 tahun). Perubahan tren juga terlihat

dengan meningkatnya migrasi perempuan, menunjukkan kecenderungan peningkatan peran perempuan dalam fenomena migrasi ilegal.

Pendidikan dan keterampilan membaca-menulis tinggi di antara migran risen, menyoroti bahwa banyak migran memiliki potensi kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi. Namun, sektor pekerjaan yang banyak diisi oleh migran adalah sektor jasa, menekankan perlunya peningkatan akses dan diversifikasi lapangan kerja. Kesehatan menjadi aspek kritis, dengan sebagian migran risen melaporkan keluhan kesehatan. Upaya untuk memastikan akses layanan kesehatan yang memadai dan pencegahan penyakit menjadi aspek yang perlu diperhatikan. (Sulaksono, 2016)

Rumah tangga migran risen menunjukkan tingkat kepemilikan aset yang signifikan, namun perlunya perhatian pada ketahanan pangan dan akses pendidikan. Sumber penerangan yang terutama berasal dari listrik PLN menunjukkan kemajuan infrastruktur di beberapa wilayah. Kondisi migrasi ilegal di Indonesia mencerminkan tantangan kompleks yang melibatkan faktor ekonomi, demografi, dan sosial. Pemahaman mendalam terhadap konteks global dan tinjauan terhadap data migrasi ilegal di tingkat nasional memberikan dasar yang kuat untuk merancang kebijakan yang efektif. Selain itu, perubahan tren dalam migrasi ilegal menekankan perlunya pendekatan yang holistik, menggabungkan aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan dalam strategi penanganan yang komprehensif.

Peran Strategis Penindakan Keimigrasian dalam Pengelolaan Migrasi

Migrasi menjadi salah satu fenomena global yang membutuhkan penanganan khusus untuk memastikan keamanan nasional, perlindungan hak asasi manusia, dan pengelolaan keberlanjutan sosial dan ekonomi. Penindakan keimigrasian, sebagai bagian integral dari sistem keimigrasian, memainkan peran strategis dalam menyikapi dan mengelola dinamika migrasi yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, essay ini akan membahas peran strategis penindakan keimigrasian dan dampaknya terhadap keamanan dan kesejahteraan nasional. (Lepp, 2002)

1. Menjaga Keamanan Nasional

Salah satu peran utama penindakan keimigrasian adalah menjaga keamanan nasional. Dengan melakukan pemeriksaan ketat terhadap individu yang masuk dan tinggal di suatu negara, pihak berwenang dapat mencegah masuknya orang-orang yang berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban dalam negeri. Upaya ini termasuk identifikasi dan penanganan terhadap individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti perdagangan manusia, terorisme, atau kejahatan lintas batas.

2. Mengelola Arus Migrasi Ilegal

Penindakan keimigrasian memainkan peran kunci dalam mengelola arus migrasi ilegal. Dengan memberlakukan peraturan ketat terkait masuk dan tinggal, pemerintah dapat mencegah praktik migrasi ilegal yang dapat membahayakan para migran dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Langkah-langkah ini melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan imigrasi dan pemberian sanksi kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.

3. Melindungi Hak Asasi Manusia

Meskipun penindakan keimigrasian bertujuan untuk menjaga keamanan nasional, penting juga untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia. Proses identifikasi, penahanan, atau deportasi harus sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, penindakan keimigrasian harus memastikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua individu, termasuk migran.

4. Meningkatkan Pengelolaan Migrasi Legal

Selain fokus pada penanganan migrasi ilegal, penindakan keimigrasian juga memiliki

peran dalam meningkatkan pengelolaan migrasi legal. Ini mencakup penegakan peraturan terkait visa, izin tinggal, dan kebijakan imigrasi lainnya. Dengan memastikan bahwa proses migrasi legal berjalan lancar, pemerintah dapat memanfaatkan kontribusi positif dari para migran terhadap ekonomi dan masyarakat setempat.

5. Menyelenggarakan Pemulangan yang Aman dan Terorganisir

Bagian integral dari penanganan migrasi adalah penyelenggaraan pemulangan yang aman dan terorganisir bagi mereka yang tidak memenuhi syarat tinggal. Penindakan keimigrasian dapat memastikan bahwa pemulangan dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan memberikan perlindungan kepada individu yang kembali ke negara asal. (Handisa, 2020)

Dalam konteks dinamika migrasi global, penindakan keimigrasian memegang peran strategis dalam menjaga keamanan nasional, mengelola arus migrasi ilegal, melindungi hak asasi manusia, meningkatkan pengelolaan migrasi legal, dan menyelenggarakan pemulangan yang aman. Penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan penindakan keimigrasian dengan bijaksana, memastikan keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia, serta berkolaborasi dengan organisasi internasional untuk mengatasi tantangan migrasi secara holistik.

Kerjasama Internasional dalam Penindakan Keimigrasian: Mengatasi Migrasi Ilegal melalui Koordinasi dan Pertukaran Informasi

Migrasi ilegal adalah fenomena global yang memerlukan kerjasama erat antar negara dan lembaga internasional untuk mencapai penanganan yang efektif. Kerjasama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari koordinasi tindakan hingga pertukaran informasi yang efektif. Dalam konteks koordinasi, negara-negara bekerja sama untuk mengembangkan protokol dan standar operasional guna meningkatkan efisiensi dalam identifikasi, penangkapan, dan penanganan pelanggaran imigrasi. Selain itu, terdapat upaya intensif dalam pertukaran informasi terkait identitas, rute migrasi ilegal, dan metode penyelundupan, yang menjadi tulang punggung keberhasilan operasi penindakan. (-, 2017)

Lembaga internasional, seperti Interpol, Frontex, dan Europol, memiliki peran sentral sebagai platform pertukaran intelijen dan pengalaman operasional antar negara. Dengan berbagi informasi yang efektif, negara-negara dapat melakukan deteksi dini, penangkapan, dan pengadilan terhadap para pelaku dan penyelenggara migrasi ilegal. Selain itu, kerjasama ini melibatkan penegakan hukum internasional dengan negara-negara berkomitmen untuk melaksanakan hukuman terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan migrasi ilegal, sesuai dengan konvensi internasional, seperti Konvensi PBB tentang Status Pengungsi.

Operasionalisasi kerjasama ini juga melibatkan pembentukan tim gabungan lintas batas, yang terdiri dari personel keamanan, imigrasi, dan penegak hukum. Tim-tim ini memungkinkan penanganan responsif dan terkoordinasi terhadap rute migrasi ilegal yang melibatkan lebih dari satu negara. Sementara itu, organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), dan UNHCR, memberikan bantuan teknis, sumber daya, dan panduan kebijakan kepada negara-negara dalam menangani migrasi ilegal. (-, 2017)

Tidak hanya itu, lembaga non-pemerintah (NGO) juga memainkan peran penting dalam menyediakan bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi para migran. Keseluruhan, kerjasama internasional dalam penindakan keimigrasian menjadi sebuah kerangka kerja yang kompleks, di mana sinergi antarnegara dan lembaga internasional menjadi semakin esensial untuk mencapai penanganan yang efektif dan berkelanjutan terhadap fenomena migrasi ilegal yang semakin kompleks.

Masuknya imigran ilegal di wilayah perbatasan Indonesia menjadi tantangan serius

yang membutuhkan kerja sama antarinstansi dan upaya preventif. Inisiatif Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menunjukkan pentingnya koordinasi dalam menanggulangi dampak kompleks yang muncul akibat migrasi ilegal. Artikel ini akan membahas peran kerja sama antar instansi dalam penanganan masalah ini. (Komang Milawati, 2022)

Kondisi Migrasi Ilegal di Indonesia: Indonesia, sebagai negara perlintasan yang strategis, sering dijadikan jalur oleh imigran ilegal menuju negara tujuan, khususnya Australia. Kegiatan migrasi ini memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap potensi kerawanan di wilayah tersebut. Konflik di Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika memicu migrasi warga negara dari berbagai negara, baik secara legal maupun ilegal, dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. (Rahma et al., 2022)

Peran Agen Penyelundup Manusia: Proses migrasi ilegal sering melibatkan agen penyelundup manusia yang memanfaatkan 'nelayan' dan 'oknum aparat' di Indonesia. Kurangnya pemahaman terhadap potensi permasalahan yang dapat timbul dari kedatangan imigran ilegal membuat situasi ini semakin kompleks. Peristiwa ini menarik perhatian pemerintah Indonesia dan dunia internasional.

Tindakan Pemerintah dan Direktorat Jenderal Imigrasi: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, menegaskan bahwa koordinasi antar instansi merupakan langkah esensial untuk menangani imigran ilegal. Upaya preventif dan tindakan tegas diperlukan, terutama dalam pengawasan terhadap imigran ilegal yang tinggal sementara di Indonesia. Koordinasi antara kantor imigrasi, yang membawahi wilayahnya, dengan kementerian atau lembaga terkait menjadi suatu keharusan.

Tujuan FGD dan Rekomendasi: Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Franky Sompie, menjelaskan bahwa Focus Group Discussion (FGD) diadakan untuk mempertegas dan menuntaskan peran masing-masing instansi dalam menangani imigran ilegal di wilayah Indonesia. Rekomendasi dari FGD diharapkan dapat memberikan panduan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan nasional penanganan imigran ilegal secara holistik.

Kesimpulan: Kerja sama antarinstansi dalam mencegah masuknya imigran ilegal di Indonesia adalah langkah penting untuk menangani dampak kompleks migrasi ilegal. Upaya preventif, pengawasan yang tegas, dan koordinasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan. Rekomendasi dari FGD diharapkan dapat menjadi dasar untuk perumusan kebijakan nasional yang lebih baik dalam menangani masalah ini. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga keamanan wilayahnya dan memberikan kontribusi positif dalam penanggulangan masalah migrasi ilegal secara global. (Naim et al., 2021)

Kebijakan Penindakan Keimigrasian yang Berbasis Hak Asasi Manusia

Keberadaan orang asing di Indonesia memunculkan berbagai modus operandi yang memerlukan penindakan keimigrasian yang tegas. Dalam menanggapi pelanggaran keimigrasian, penting untuk menjaga hak asasi manusia dan menghindari diskriminasi serta perlakuan tidak manusiawi. Artikel ini akan mengeksplorasi upaya kebijakan penindakan keimigrasian yang memprioritaskan hak asasi manusia.

Tantangan dalam Keimigrasian di Indonesia: Pelanggaran keimigrasian seperti overstay, penggunaan dokumen palsu, dan imigrasi ilegal semakin sering terjadi. Dalam menanggapi hal ini, penting untuk menentukan batasan antara penegakan hukum pidana dan administratif agar proses penyelesaian kasus dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien. (Nugroho, 2017)

Peran Imigrasi dalam Menjaga Kedaulatan Negara: Direktorat Jenderal Imigrasi, di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memiliki peran krusial sebagai penjaga pintu gerbang negara. Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan bahwa

keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara untuk menjaga kedaulatan negara. Fungsi keimigrasian melibatkan pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara, dan mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Selective Policy sebagai Pendekatan Holistik: Penerapan selective policy menjadi salah satu upaya kebijakan keimigrasian yang memperhatikan keseimbangan antara Pendekatan Keamanan dan Pendekatan Kesejahteraan. Kebijakan ini memastikan bahwa orang asing yang masuk dan tinggal di Indonesia membawa manfaat tanpa potensi membahayakan negara.

Perizinan Keimigrasian sebagai Syarat Utama: Setiap orang asing yang ingin memasuki dan beraktivitas di Indonesia diwajibkan memiliki perizinan keimigrasian sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya. Hal ini menjadi langkah untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang hadir di Indonesia telah memenuhi persyaratan dan membawa manfaat positif.

Tindakan Tegas dan Sanksi Sesuai Pelanggaran: Orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian perlu dikenai tindakan dan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tujuan tindakan ini bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menegakkan kedaulatan negara. Dalam penindakan keimigrasian, penting untuk menjaga hak asasi manusia dan menghindari diskriminasi. Kebijakan yang holistik dan berbasis pada pendekatan keamanan dan kesejahteraan dapat menjaga keseimbangan antara menjaga kedaulatan negara dan menjalankan penegakan hukum. Dengan demikian, Indonesia dapat memberikan kontribusi positif dalam menangani isu keimigrasian secara manusiawi dan sesuai dengan norma hak asasi manusia. (Setiawati, 2015)

Upaya pencegahan kekerasan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan ruang detensi Imigrasi menjadi fokus Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM. Melalui komitmen yang kuat, Imigrasi menjalin kerja sama dengan lembaga pengawas hak asasi manusia, termasuk Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Ombudsman, dan LPSK. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa penindakan keimigrasian tetap berbasis hak asasi manusia, menghindari kekerasan, dan menjaga martabat setiap individu.

Langkah-langkah Konkret dalam Kerja Sama: Penandatanganan kerja sama ini, yang melibatkan lembaga-lembaga pengawas hak asasi manusia, menetapkan beberapa langkah konkret. Ini mencakup pemberian akses informasi kepada orang asing yang berada di Rudenim, kunjungan bersama untuk pengawasan di rumah detensi dan ruang Imigrasi, serta peningkatan kapasitas SDM yang menangani detensi.

Pentingnya Pengawasan untuk Mencegah Penyiksaan: Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie, menegaskan bahwa perjanjian ini penting untuk mencegah penyiksaan terhadap tahanan. Dengan melibatkan lima lembaga pengawas hak asasi manusia, kerja sama ini diharapkan dapat mendukung upaya Imigrasi dalam mengedepankan aspek hak asasi manusia dalam setiap tindakan penindakan keimigrasian.

Jumlah Orang Asing dan Keimigrasian: Ronny F Sompie juga memberikan gambaran tentang jumlah orang asing yang berada di dalam Rudenim dan ruang detensi Imigrasi. Dengan lebih dari 300 warga negara asing yang ditahan, langkah-langkah pencegahan kekerasan menjadi semakin mendesak.

Kontribusi Program terhadap Hak Asasi Manusia: Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM, Hariansyah, menilai program ini sangat penting dalam implementasi komponen internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pemantauan dan evaluasi yang terencana dengan baik diharapkan dapat memastikan bahwa penindakan keimigrasian tidak hanya berfokus pada hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan. Kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan lembaga-lembaga pengawas hak asasi manusia menunjukkan komitmen untuk menjaga hak asasi manusia dalam setiap langkah

penindakan keimigrasian. Dengan melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki keahlian dalam pemantauan hak asasi manusia, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah kekerasan dan memastikan bahwa penindakan keimigrasian berlangsung dengan menghormati martabat setiap individu.

Evaluasi Strategi Penindakan Keimigrasian yang Efektif:

Efektivitas Penindakan: Sejauh mana strategi penindakan keimigrasian telah berhasil mencapai tujuannya? Evaluasi efektivitas perlu mempertimbangkan jumlah deportasi yang berhasil, penurunan kegiatan ilegal, dan peningkatan keamanan nasional. Evaluasi kinerja dan dampak sosial juga harus dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap.

Dampak terhadap Masyarakat dan Ekonomi: Evaluasi harus mencakup dampak strategi penindakan keimigrasian terhadap masyarakat dan ekonomi. Pertimbangkan dampaknya terhadap ketenagakerjaan, integrasi sosial, dan kontribusi ekonomi para imigran. Jika ada dampak negatif, perlu dipertimbangkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai.

Pertimbangan Hukum dan Etika: Evaluasi terhadap regulasi yang mendukung penindakan keimigrasian harus mempertimbangkan aspek hukum dan etika. Apakah regulasi tersebut sesuai dengan norma hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia? Apakah ada kebijakan yang dapat ditingkatkan untuk mengatasi potensi pelanggaran hak asasi manusia? **Ketepatan dan Kelengkapan Regulasi:** Periksa apakah regulasi yang ada sudah cukup akurat dan komprehensif untuk mengatasi tantangan keimigrasian. Identifikasi potensi celah hukum atau kekurangan dalam regulasi yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang ingin menghindari penindakan. (Prakasa, 2019)

Peningkatan Kolaborasi Internasional: Perbaikan dalam kerjasama internasional dapat memperkuat penindakan keimigrasian. Evaluasi apakah ada peluang untuk meningkatkan pertukaran informasi dan kolaborasi antarnegara, terutama mengenai pencarian suaka dan deportasi. **Penggunaan Teknologi:** Mempertimbangkan penerapan teknologi dalam meningkatkan efisiensi penindakan keimigrasian. Penggunaan sistem informasi dan analisis data dapat membantu mengidentifikasi dan melacak individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal. (Palullungan & Pandean, 2019)

Penyuluhan dan Integrasi Masyarakat: Penting untuk mempertimbangkan pendekatan yang melibatkan penyuluhan masyarakat dan integrasi imigran. Kebijakan yang mendukung adaptasi imigran ke dalam masyarakat dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan efektivitas strategi penindakan. **Pelibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):** Evaluasi keterlibatan LSM dan kelompok hak asasi manusia dalam memantau dan memberikan masukan kritis terhadap penindakan keimigrasian. Kerjasama dengan LSM dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keimigrasian. Evaluasi menyeluruh terhadap strategi penindakan keimigrasian dan regulasi terkait adalah langkah kunci untuk memastikan keberlanjutan, efektivitas, dan dampak positif terhadap masyarakat dan ekonomi. Peningkatan sistem keimigrasian harus melibatkan kajian mendalam terhadap hukum, etika, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Keterlibatan Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil dalam Penindakan Keimigrasian:

Peran Sektor Swasta: Sektor swasta memiliki peran krusial dalam mendukung upaya penindakan keimigrasian. Perusahaan-perusahaan dapat berkontribusi melalui teknologi keamanan, pemberdayaan tenaga kerja, dan kemitraan dengan pemerintah. Investasi sektor swasta dalam teknologi pemantauan dan identifikasi dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam mendeteksi dan menanggapi kegiatan ilegal.

Selain itu, sektor swasta dapat membantu melalui program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing. Kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dapat menciptakan

inisiatif bersama untuk mengatasi masalah migrasi ilegal.

Partisipasi Masyarakat Sipil: Masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam menjamin keberhasilan penindakan keimigrasian yang adil dan berbasis hak asasi manusia. LSM, kelompok advokasi, dan organisasi hak asasi manusia dapat memainkan peran pengawas, memastikan bahwa tindakan penindakan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Partisipasi masyarakat sipil juga dapat melibatkan upaya penyuluhan dan advokasi untuk memahami masyarakat tentang isu-isu keimigrasian, mengurangi stigmatisasi terhadap imigran, dan mempromosikan inklusivitas sosial. Masyarakat sipil dapat menjadi suara bagi individu yang mungkin menghadapi ketidakadilan atau penyalahgunaan hak mereka selama proses penindakan. (Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia (Studi Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan), n.d.)

Peningkatan Kolaborasi Sektor Swasta dan Pemerintah: Prospek implementasi strategi keimigrasian di masa depan dapat ditingkatkan melalui kolaborasi yang lebih erat antara sektor swasta dan pemerintah. Pengembangan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan dan analisis data canggih, dapat menjadi fokus kerjasama untuk meningkatkan efektivitas penindakan.

Inovasi dalam Pendidikan dan Pelatihan: Prospek positif juga terletak pada inovasi dalam pendidikan dan pelatihan. Pemerintah bersama sektor swasta dapat mengembangkan program pendidikan yang mempersiapkan tenaga kerja lokal dengan keterampilan yang diperlukan, sehingga mengurangi ketergantungan pada imigran untuk pekerjaan tertentu.

Penguatan Peran Masyarakat Sipil: Meningkatnya partisipasi masyarakat sipil dapat menghasilkan prospek yang lebih baik untuk penindakan keimigrasian yang adil. Pemberdayaan masyarakat untuk mengawasi dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Potensi Ketidaksetaraan Akses: Tantangan utama di masa depan mungkin termasuk potensi ketidaksetaraan akses terhadap kebijakan dan layanan keimigrasian. Pemerintah perlu memastikan bahwa upaya penindakan tidak hanya menguntungkan sektor tertentu, tetapi juga memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. **Ketidakpastian Politik dan Sosial:** Faktor ketidakpastian politik dan sosial dapat menjadi hambatan bagi implementasi kebijakan keimigrasian. Perubahan dalam opini publik atau pergeseran politik dapat mempengaruhi kemauan pemerintah untuk melibatkan sektor swasta atau mendengarkan masukan dari masyarakat sipil.

Perlunya Rangkul Diversitas: Dalam proses penindakan, penting untuk merangkul diversitas dan mengakui manfaat yang dapat dibawa oleh imigran. Tantangan terletak pada perluasan perspektif masyarakat dan pemerintah terhadap kontribusi positif yang dapat diberikan oleh imigran terhadap ekonomi dan keberagaman budaya. Masa depan penindakan keimigrasian akan sangat dipengaruhi oleh kolaborasi yang erat antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil. Sambil memperhitungkan tantangan yang mungkin muncul, prospek positif dapat diwujudkan melalui inovasi, partisipasi masyarakat, dan perhatian terhadap keadilan sosial. Pengajuan paspor elektronik oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia (RI) menandai sebuah inovasi signifikan dalam kebijakan keimigrasian. Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam implementasi kebijakan ini dapat memberikan dampak positif yang besar.

Dalam konteks sektor swasta, terdapat peluang untuk memanfaatkan teknologi dan sistem terintegrasi, seperti SIMKIM, yang dapat mempercepat proses pengajuan paspor elektronik. Kerjasama dengan perusahaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam penerbitan dokumen keimigrasian. Adanya kolaborasi ini dapat

memberikan kontribusi terhadap kemudahan akses dan pemrosesan data bagi WNI di luar negeri.

Selain itu, partisipasi masyarakat sipil dalam membantu sosialisasi dan edukasi terkait prosedur pengajuan paspor elektronik sangatlah penting. Kampanye informasi yang baik dapat memberikan pemahaman kepada WNI mengenai manfaat paspor elektronik, terutama dalam mendukung perjalanan lintas batas dan permohonan visa.

Keberhasilan penerapan kebijakan ini terlihat dalam penyerahan simbolis paspor elektronik oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, kepada Duta Besar RI untuk Belanda dan WNI di Belanda. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada WNI di luar negeri.

Prospek ke depan terkait keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam kebijakan keimigrasian ini sangat positif. Dengan terus meningkatkan kolaborasi, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan WNI di seluruh dunia.

Namun, tantangan yang mungkin muncul termasuk upaya untuk memastikan keamanan data pribadi dan sistem, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebijakan ini. Diperlukan upaya bersama untuk mengatasi potensi hambatan tersebut.

Secara keseluruhan, langkah ini menegaskan bahwa kebijakan keimigrasian yang progresif memerlukan kerja sama erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan memberikan akses yang lebih mudah dan memberdayakan WNI di luar negeri, langkah ini berpotensi memberikan dampak positif dalam mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan WNI di mancanegara.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi kompleksitas masalah migrasi ilegal, penindakan keimigrasian memerlukan strategi dan kebijakan yang efektif. Kesimpulan dari upaya ini menegaskan bahwa pendekatan holistik dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci keberhasilan.

Strategi penindakan keimigrasian yang efektif harus menggabungkan penggunaan teknologi modern, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan regulasi yang adil. Kolaborasi dengan sektor swasta membuka pintu untuk inovasi teknologi, sedangkan melibatkan masyarakat sipil memastikan transparansi dan keseimbangan keadilan.

Pentingnya peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal menjadi poin sentral. Dengan demikian, ketergantungan pada imigran untuk pekerjaan tertentu dapat dikurangi, menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua pihak. Dalam konteks ini, diversitas diakui sebagai kekayaan, dan perlunya merangkul kontribusi positif imigran terhadap ekonomi dan keberagaman budaya menjadi bagian integral dari strategi kebijakan.

Tantangan yang dihadapi, seperti ketidaksetaraan akses dan ketidakpastian politik, memerlukan ketelitian dan adaptasi. Penindakan keimigrasian yang berhasil tidak hanya melibatkan pemenuhan kepentingan ekonomi, tetapi juga menjaga hak asasi manusia, memastikan keadilan sosial, dan mengelola dampak sosial secara bijaksana.

Dengan demikian, kesimpulan dari strategi dan kebijakan penindakan keimigrasian adalah bahwa solusi yang berkelanjutan memerlukan kerjasama yang kokoh, kebijakan inklusif, dan pendekatan yang memahami kompleksitas permasalahan migrasi ilegal. Hanya dengan berbagai pihak bersatu, masyarakat dapat mengatasi tantangan ini dan membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. (2017). Migrasi Internasional Pada Wanita di Kabupaten Tulungagung: Sebuah Konstruksi Sosial. *JURNAL SOSIAL POLITIK*. <https://doi.org/10.22219/.v2i2.4399>
- Anggaunitakiranantika, A. (2017). Interaksi Buruh Migran Perempuan Sebagai Kekuatan Modal Sosial. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*. <https://doi.org/10.17977/um021v2i12017p033>
- Handisa, R. H. (2020). Studi Litelatur Tantangan Perpustakaan dalam Pelestarian Koleksi Digital. *Libria*.
- Husni, L., Suryani Hamzah, A., & Hirsanuddin, H. (2023). Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dan Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pemenang Timur. *Private Law*. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.2113>
- Komang Milawati. (2022). TINJAUAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN IZIN TINGGAL IMIGRASI DI KOTA MAKASSAR. *Repository.Unibos.Ac.Id*.
- Lepp, A. (2002). Trafficking in women and the feminization of migration: the Canadian context. *Canadian Woman Studies*.
- Naim, A., Renggong, R., & Siku, A. S. (2021). ANALISIS PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN OVERSTAY OLEH WARGA NEGARA ASING DI MAKASSAR. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.35965/jpan.v3i2.668>
- Nugroho, O. C. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.231-247>
- Palullungan, L., & Pandean, M. (2019). IMPLEMENTASI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN OLEH PEJABAT ADMINISTRATIF NEGARA DI KANTOR IMIGRASI KELAS I MAKASSAR. In *Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.
- Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia (Studi Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan). (n.d.). Retrieved April 14, 2023, from <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/35435>
- Prakasa, I. G. (2019). TINJAUAN IMPLEMENTASI APLIKASI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN (NYIDAKIM) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA. *TEMATICS (Technology Management and Informatics Research)*.
- Rahma, A. N., ALW, L. T., & Diamantina, A. (2022). PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING OLEH KANTOR IMIGRASI YOGYAKARTA. *Diponegoro Law Journal*.
- Setiawati, D. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay). *Pandecta: Research Law Journal*. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4191>
- Sofyan, B. (2014). Menyikapi Arus Imigran Gelap Menuju Australia Guna Mengamankan Kepentingan Nasional Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*.
- Sulaksono, E. (2016). Keamanan Lintas Perbatasan: Studi Migran Ilegal antara Batam dan Johor. *Jurnal Keamanan Nasional*. <https://doi.org/10.31599/jkn.v2i2.47>
- Triantoro, B. W. (2016). MIGRASI LEGAL DAN ILEGAL KE MALAYSIA BARAT: KASUS MIGRASI INTERNASIONAL DI PULAU LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT. *Populasi*. <https://doi.org/10.22146/jp.12482>
- Yuli Kusmanto, T. (2014). TRAFFICKING: SISI BURAM MIGRASI INTERNASIONAL. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.633>